

BAB II

GAMBARAN UMUM

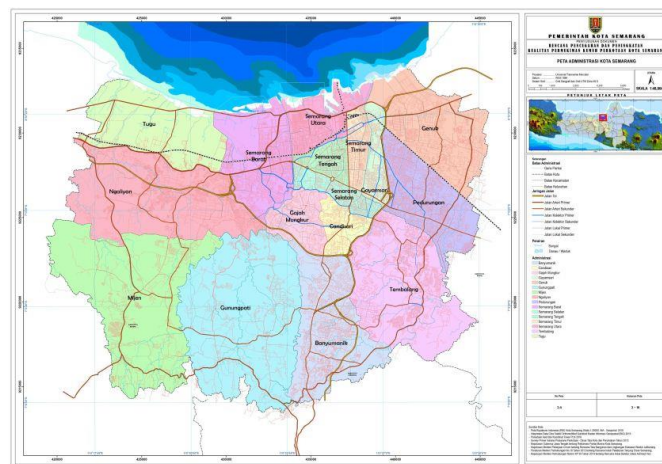
2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Gambaran umum Kota Semarang menjelaskan mengenai kondisi Kota Semarang dari berbagai aspek seperti letak dan kondisi geografis, kondisi penduduk, visi dan misi, dan deskripsi terkait Kota Semarang.

2.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Secara geografis Kota Semarang mempunyai bentuk yang memanjang dari utara ke selatan. Luas wilayah Kota Semarang 373,70 km² (BPS Kota Semarang). Dari total luas tersebut 10,59% (39,56 Km²) diantaranya berupa tanah basah atau sawah, dan sisanya 89,41% (334,14 Km²) merupakan tanah kering atau bukan sawah).

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber : RP2KPKP Kota Semarang Tahun 2017

Kota Semarang terbagi kedalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Secara geografis, Kota Semarang berada pada posisi astronomi di antara garis $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah barat dengan Kabupaten Kendal;
- b. Sebelah timur dengan Kabupaten Demak;
- c. Sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang; dan
- d. Sebelah utara dengan Laut Jawa dengan panjang garis pantai sekitar 13,6 km

2.1.2 Kondisi Penduduk Kota Semarang

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2016, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.729.428 jiwa. Dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2016). kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat Kecamatan Gayamsari sebagai wilayah terpadat dengan kepadatan penduduk 12.853 jiwa/ km², sedangkan Kecamatan Tugu merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah dengan kepadatan penduduk 1.008 jiwa/ km².

Tabel 2. 1 Jumlah Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Mijen	57,55	69.789	1.213
2.	Gunungpati	54,11	109.445	2.023
3.	Banyumanik	25,69	155.994	6.072
4.	Gajah Mungkur	9,07	59.960	6.611
5.	Smg. Selatan	5,93	69.684	11.755
6.	Candisari	6,54	75.946	11.613
7.	Tembalang	44,20	194.231	4.394
8.	Pedurungan	20,72	203.866	9.839
9.	Genuk	27,39	110.786	4.045
10.	Gayamsari	6,18	79.394	12.853
11.	Smg. Timur	7,70	74.861	9.722
12.	Smg. Utara	10,97	118.157	10.771
13.	Smg. Tengah	6,14	60.375	9.833
14.	Smg. Barat	21,74	161.054	7.408
15.	Tugu	31,78	32.041	1.008
16.	Ngaliyan	37,99	153.844	4.050
Total		373,70	1.729.428	4.628

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, Tahun 2017

2.1.3 Visi dan Misi Kota Semarang

Visi Kota Semarang

“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat yang Semakin Sejahtera.”

Misi Kota Semarang

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan.
3. Mewujudkan Kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

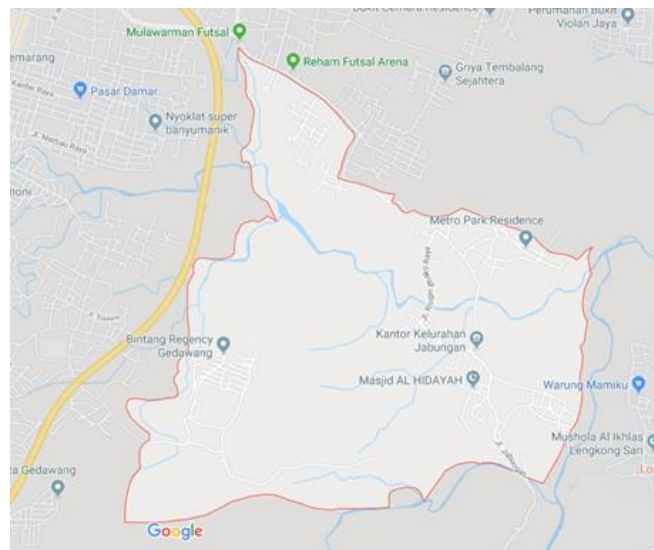
2.2. Gambaran Umum Kelurahan Jabungan

Gambaran umum Kelurahan Jabungan menjelaskan mengenai kondisi Kelurahan Jabungan dari berbagai aspek seperti letak dan kondisi geografis, visi dan misi, kondisi penduduk dan struktur organisasi Kelurahan Jabungan.

2.2.1 Letak Kondisi geografis Kelurahan Jabungan

Kelurahan Jabungan adalah salah satu dari 117 Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Banyumanik yang memiliki luas 226,5 Ha. Secara geografis Kelurahan Jabungan merupakan wilayah daratan tinggi/ perbukitan. Kelurahan Jabungan merupakan kelurahan pinggiran/perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang sehingga merupakan jalur alternatif antar kota dari Kabupaten Semarang.

Gambar 2. 2 Peta Kelurahan Jabungan



Sumber : Google Maps Kelurahan Jabungan

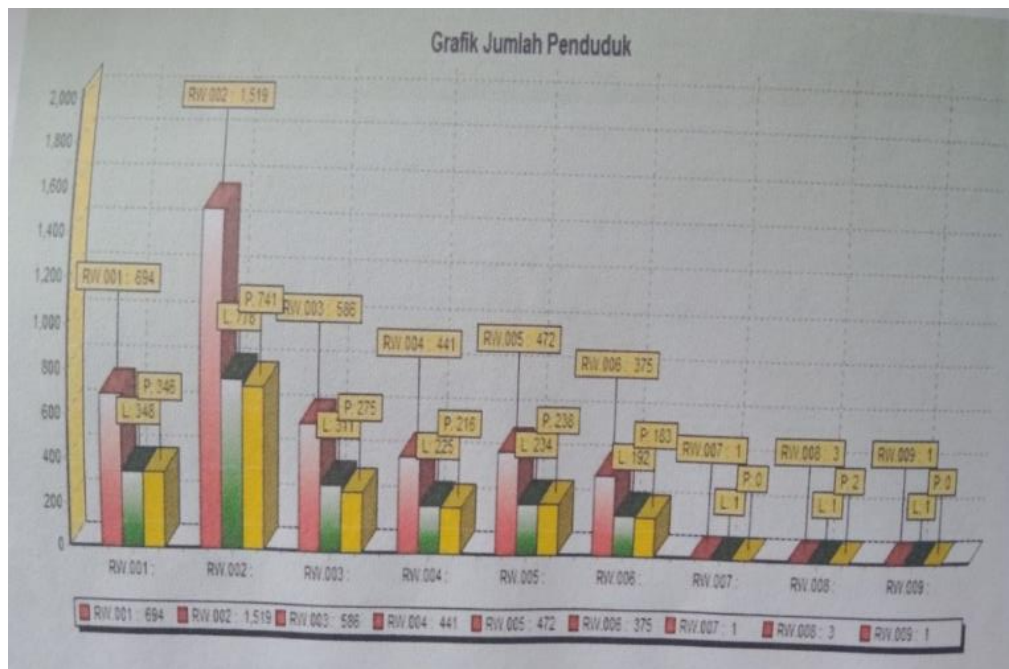
Kelurahan Jabungan memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kel. Kramas & Kel. Meteseh (Kec. Tembalang)
- b. Sebelah Selatan : Desa Mluweh (Kabupaten Semarang)
- c. Sebelah Timur : Desa Kalikayen (Kabupaten Semarang)
- d. Sebelah Barat : Kel. Padangsari, Kel. Pedal

2.2.2 Kondisi Penduduk Kelurahan Jabungan

Sesuai dalam dokumen profil Kelurahan Jabungan tercatat Jumlah penduduk Kelurahan Jabungan pada tahun 2019 sebesar 1.315 KK yaitu 4.095 jiwa.

Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Kelurahan Jabungan tahun 2019

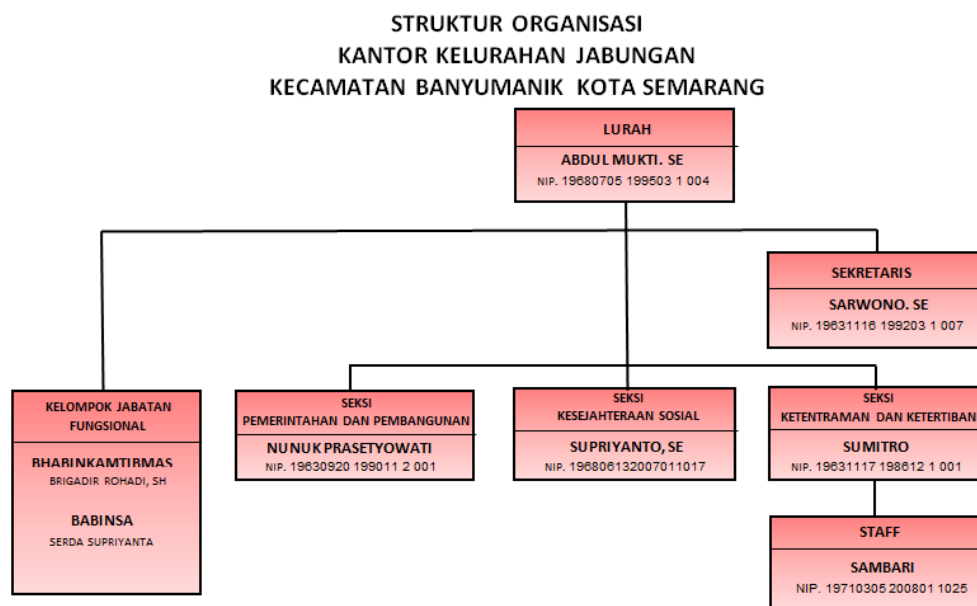


Sumber: Profil Kelurahan Jabungan

Sesuai pada jumlah penduduk di Kelurahan Jabungan dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang dominan atau paling banyak terdapat di RW 02 sebanyak 1.519 jiwa dan yang paling sedikit terdapat di wilayah RW 09 sebanyak 1 jiwa.

2.2.3 Struktur Organisasi Kelurahan Jabungan

Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Kelurahan Jabungan



Sumber : Profil Kelurahan Jabungan

Berdasarkan struktur organisasi kantor Kelurahan Jabungan, semua pengurus turut mendukung keberlanjutan dari program PAMSIMAS. Disebut juga sebagai masyarakat, pengurus Kelurahan Jabungan turut berpartisipasi dalam kegiatan sesuai RKM yang dirancang melalui musyawarah.

2.2.3 Visi dan Misi Kelurahan Jabungan

Visi Kelurahan Jabungan

“ Terwujudnya keluarga yang dinamis berkualitas dengan pelayanan prima ”

Misi Kelurahan Jabungan

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja
3. Memberikan pelayanan prima

2.3 Gambaran Umum Pamsimas

2.3.1 Tujuan Pamsimas

Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan dan periurban.

2.3.2 Sasaran

2.3.2.1 Sasaran Program

Tujuan Program Pamsimas dapat terwujud apabila sasaran program di bawah ini tercapai, adapun indikator kinerja kunci (*key performance indicator/KPI*) Program Pamsimas, yaitu:

- 1) Terdapat tambahan 22.1 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air minum aman dan berkelanjutan;
- 2) Terdapat tambahan 14.9 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
- 3) Minimal pada 60% masyarakat dusun lokasi program seluruh penduduknya menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);

- 4) Minimal 70% masyarakat mengadopsi perilaku program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
- 5) Minimal 70% Pemerintah kabupaten memiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan Pendekatan Pamsimas dan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi daerah;
- 6) Minimal 60% Pemerintah kabupaten mempunyai peningkatan belanja di bidang air minum dan sanitasi dalam rangka pemeliharaan sistem pelayanan air minum dan sanitasi saat ini serta pencapaian akses universal air minum dan sanitasi.

2.3.2.2. Sasaran Lokasi

Sasaran Program Pamsimas adalah kabupaten yang memiliki cakupan pelayanan air minum aman perdesaan yang belum mencapai 100%. Penetapan kabupaten sasaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan minat Pemerintah Kabupaten, sedangkan pemilihan desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan. Target desa sasaran Program Pamsimas adalah kurang lebih 27.000 desa (2008-2020). Mulai tahun 2016, Pamsimas akan melaksanakan pendampingan di 15.000 desa baru (yang belum pernah mendapatkan program Pamsimas sebelumnya), serta pendampingan keberlanjutan pada kurang lebih 27.000 desa peserta PAMSIMAS.

Secara umum, kriteria desa sasaran baru PAMSIMAS meliputi:

1. Belum pernah mendapatkan Program PAMSIMAS;
2. Cakupan akses air minum aman belum mencapai 100%; yaitu di bawah 68.87%;
3. Cakupan akses sanitasi layak belum mencapai 100%; yaitu di bawah 62.41%;
4. Prevalensi penyakit diare (atau penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan) tergolong tinggi berdasarkan data Puskesmas;
5. Memenuhi biaya per penerima manfaat yang efisien³;
6. Adanya pernyataan kesanggupan pemerintah desa untuk menyediakan minimal 10% pembiayaan untuk rencana kerja masyarakat (RKM) yang bersumber dari APBDesa;
7. Adanya pernyataan kesanggupan masyarakat untuk:
 - a. Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang akan fokus menangani bidang AMPL (selanjutnya disebut dengan Kader AMPL);
 - b. Menyediakan kontribusi sebesar minimal 20% dari kebutuhan biaya RKM, yang terdiri dari 4 % dalam bentuk uang tunai (in-cash) dan 16 % dalam bentuk natura (in-kind);
 - c. Menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS).

2.3.3 Strategi, Pendekatan dan Prinsip

Untuk mewujudkan program nasional “Akses Universal Air Minum dan Sanitasi 2019” dengan capaian target 100% akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh penduduk Indonesia, Program Pamsimas ditantang untuk melakukan berbagai pendekatan dan berkolaborasi secara proaktif dalam pemanfaatan sumber dana non-pemerintah, sumber daya manusia dan program terutama di bidang pengembangan kapasitas dengan pihak-pihak lain di luar Program PAMSIMAS.

2.3.3.1 Strategi

1. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas maka diterapkan strategi sebagai berikut:
2. Membangun masyarakat hidup bersih dan sehat melalui pembangunan sistem air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
3. Mengarusutamakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dalam pembangunan sistem air minum dan sanitasi;
4. Melakukan sharing program APBN, APBD dan APBDes dalam pembiayaan program; dimana untuk ‘Desa-APBN’, dana APBN akan membiayai BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk sebesar 70% dari kebutuhan pendanaan desa sasaran, APBDes sebesar 10% untuk fisik maupun non-fisik dan Masyarakat sisanya sebesar 20%. Untuk ‘Desa-APBD’, dana APBD akan membiayai BLM untuk sejumlah 70% kebutuhan pendanaan desa sasaran,

APBDes sebesar 10% untuk fisik maupun non-fisik dan Masyarakat sisanya sebesar 20%;

5. Penerapan tiga pilihan kegiatan pembangunan dan pengembangan SPAM pada desa sasaran Pamsimas, sebagai berikut:
 - a. Pembangunan baru yaitu pembangunan baru SPAM karena belum ada SPAM eksisting, atau pembangunan baru SPAM karena sistem yang ada tidak berfungsi total (100%) dari produksi sampai dengan distribusi ;
 - b. Perluasan yaitu kegiatan pengembangan pada unit distribusi SPAM pada desa yang telah memiliki SPAM dengan tingkat keberfungsian yang baik untuk menambah cakupan dan jumlah penerima manfaat, atau pembangunan tambahan SPAM baru dengan tujuan untuk menambah jumlah layanan;
 - c. Peningkatan yaitu pemulihan dan pengembangan kinerja SPAM (termasuk penggantian sebagian komponen atau perbaikan komponen utama) dengan tujuan meningkatkan kinerja SPAM serta penambahan jumlah layanan dari jumlah layanan semula (dengan minimal tambahan jumlah layanan adalah 30% dari jumlah layanan semula).
6. Desa penerima bantuan Program Pamsimas terdiri dari:
 - a. Desa baru, yaitu desa yang belum pernah mendapatkan bantuan Pamsimas, walaupun sudah pernah mendapatkan bantuan program air minum dan sanitasi dari program lainnya. Desa baru ini dapat mempunyai salah satu dari pilihan kegiatan pembangunan baru, perluasan, atau peningkatan;

- b. Desa perluasan, yaitu desa yang sudah pernah mendapatkan bantuan Pamsimas namun masih mempunyai kapasitas untuk dikembangkan, baik dari sisi teknis dan pelayanan (misalnya masih ada *idle capacity* atau penambahan jaringan). Sebagai catatan, pengembangan harus berada dalam satu lembaga pengelola yang sama (BPSPAMS); Desa peningkatan, yaitu desa yang sudah pernah mendapatkan bantuan Pamsimas dengan kinerja SPAM yang buruk (berstatus merah dan kuning) sehingga perlu mendapatkan bantuan untuk peningkatan kinerja dengan catatan ada penambahan jumlah pemanfaat minimal sebesar 30% dari jumlah pemanfaat semula, serta ada perbaikan kinerja dari sisi kelembagaan dan keuangan.
- c. Penerapan Pagu BLM pada Tingkat Kabupaten, dimana pagu BLM diterapkan di tingkat kabupaten dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan usulan target tambahan penerima manfaat program lingkup kabupaten. Alokasi BLM pada setiap desa sasaran Pamsimas selanjutnya diputuskan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan hasil evaluasi RKM desa;
- d. Penerapan Pendekatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) - pendekatan STBM diterapkan pada skala kabupaten dengan pelibatan aktif dan intensif para sanitarian, penanggungjawab promkes, kepala puskesmas, bidan desa, kader kesehatan, dan fasilitator STBM di tingkat kabupaten;
- e. Penguatan Kelembagaan di tingkat kabupaten dilakukan sebagai bagian dari fungsi Pokja AMPL dan Asosiasi Pengelola SPAM perdesaan. Kedua

lembaga ini akan terus berperan dalam membantu Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan program air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat, memastikan keberlanjutan program, dan memfasilitasi kemitraan pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

- f. Penguatan peran Pemerintah Desa untuk mampu mengelola pengembangan SPAM di wilayahnya baik melalui Pamsimas, APBDesa, program air minum dan sanitasi lainnya maupun swadaya, mengintegrasikan program AMPL dalam perencanaan pembangunan desa, serta meningkatkan pembiayaan bidang AMPL untuk mencapai target pelayanan air minum dan sanitasi 100% bagi warga masyarakat.
- g. Penguatan peran Kader AMPL di Perdesaan untuk mampu berperan aktif mulai dari tahap persiapan dan perencanaan program sampai dengan tahap pemutakhiran informasi/data pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat serta prioritas program air minum dan sanitasi perdesaan pada Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan forum pembangunan lainnya.
- h. Sinergi dengan program APBD reguler, DAK PAM STBM/Kesehatan dan Hibah Air Minum Perdesaan. Program Pamsimas mendorong sinergi program air minum dan sanitasi perdesaan melalui berbagai pendanaan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi di perdesaan. Program Pamsimas mempunyai tenaga pendamping tingkat kabupaten (Tim Koordinator Kabupaten) dan desa (Tim Fasilitator

Masyarakat: FS dan FM) yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten dan desa yang ingin memperluas atau memperbaiki kinerja sarana air minum dan sanitasi melalui Program APBD reguler, DAK PAM STBM/Kesehatan dan Hibah Air Minum Perdesaan. Pemerintah Kabupaten dapat memulai upaya sinkronisasi antar program dengan Pamsimas sejak proses pemilihan desa dan penyusunan rencana kerja masyarakat (RKM).

2.3.3.2 Pendekatan

Seluruh pelaksanaan dan pengelolaan Program Pamsimas ini menganut pendekatan sebagai berikut:

1. Kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga berbasis TUPOKSI, artinya Program Pamsimas merupakan program bersama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berdasarkan tupoksi masingmasing
2. Peran Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang kebijakan dalam pemilihan desa serta kolaborasi berbagai program air minum dan sanitasi yang bekerja di wilayah kabupaten untuk memastikan percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi;

3. Berbasis Masyarakat; artinya Program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.

2.3.3.4 Prinsip

Prinsip yang diterapkan dalam Program Pamsimas adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggap Kebutuhan - Program Pamsimas diberikan kepada lokasi yang membutuhkan dan bersedia memelihara serta mengelola sistem terbangun. Alokasi bantuan dana stimulan BLM disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat;
- 2) Partisipatif - seluruh masyarakat (baik miskin, kaya, perempuan, laki-laki) menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan Program Pamsimas;
- 3) Kesetaraan Gender - Program Pamsimas memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi;
- 4) Keberpihakan pada Masyarakat Miskin - Program Pamsimas memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman;
- 5) Akses bagi Semua Masyarakat - Program Pamsimas memastikan semua masyarakat termasuk masyarakat berkebutuhan khusus (penyandang

disabilitas) dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan;

- 6) Perlindungan pada Anak - Program Pamsimas memastikan bahwa pelayanan yang air dan sanitasi yang dibangun melalui program mudah untuk dimanfaatkan dan ramah pada anak;
- 7) Keberlanjutan - sarana terbangun dan perubahan perilaku memberikan manfaat secara menerus. Keberlanjutan harus diciptakan bersama oleh para pelaku Program Pamsimas sejak awal pelaksanaan;
- 8) Transparansi dan Akuntabilitas - pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil Program Pamsimas harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh pelaku terkait dan masyarakat berhak mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya;
- 9) Berbasis Nilai - Program Pamsimas diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan gotong royong.

2.3.4 Kondisi Yang Diarahkan

Strategi, pendekatan, dan prinsip dalam Program Pamsimas adalah untuk mewujudkan lingkungan strategis yang mendukung pencapaian tujuan program yaitu:

- 1) Masyarakat bersedia menerapkan perilaku dan praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

- 2) Masyarakat memperoleh akses yang berkelanjutan terhadap pelayanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak, serta mampu menggunakan, memelihara, dan mengelola pelayanan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan;
- 3) Pemerintah Desa memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung dan mengupayakan keberlanjutan serta pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi di desa dengan berpegang pada prinsip Pamsimas;
- 4) Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) memiliki komitmen yang kuat dalam perluasan pelaksanaan program dan pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan dengan menggunakan pendekatan Pamsimas;
- 5) Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kelembagaan, teknis dan keuangan dalam sistem pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan capaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi, dibutuhkan komitmen dan upaya dan koordinasi terpadu antar pemerintahan dan masyarakat, dan disertai dengan terobosan/ inovasi dalam perencanaan dan pengelolaan program. Peran dan keterlibatan aktif pemerintah daerah, desa dan masyarakat menjadi penentu utama keberhasilan Program PAMSIMAS.